BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara peneliti yaitu pada tanggal 21-24 Juni 2011 yang dilakukan pada Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan. Pada hari selasa 21 Juni 2011 peneliti melakukan wawancara kepada KH. Dodo Murtadlo, Lc di rumah beliau di Pondok Pesantren Riyadhul Huda Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan pada pukul 07.00, kemudian wawancara dilanjutkan kepada narasumber berikutnya, Drs. Abdullah N. Dunun di rumah beliau yaitu di Pondok Pesantren Al Mutawali Cilimus Kabupaten Kuningan pada pukul 16.00. Pada hari kamis 23 Juni 2011 peneliti melakukan wawancara kepada KH. Abd. Aziz AN dan KH. Aman Syamsul Falahm S. Pd.i pada hari jumat 24 Juni 2011 pada pukul 18.15 di rumah beliau di Pondok Pesantren Nurul Huda Kelurahan Windusengkahan Kabupaten Kuningan. Hasil dari penelitian ini peneliti peroleh melalui analisis mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kunigan yang kemudian mendeskripsikannya kedalam suatu bentuk analisis yang tersistematis.

Pembahasan bab ini mengacu kepada identifikasi masalah penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan mengenai komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Kepala Daerah di

Kabupaten Kuningan tahun 2009, yaitu dengan menggunakan metode *analisis deskriptif* yang berupa bagian dari metode analisis data dalam penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini merupakan bentuk konkret mengenai komunikasi politik pengurus besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuningan tahun 2009. Pembahasan pada bab ini akan dibahas serta diuraikan mengenai tiga *point* utama yang mendeskripsikan mengenai:

1. Deskripsi informan
2. Hasil penelitian
3. Pembahasan

4.1. Profile Informan Penelitian

4.1.1. KH. Dodo Murtadlo, Lc



(Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2011)

Bapak KH. Dodo Murtadlo, Lc adalah ketua FKPP priode ke-2 sejak (1998-2009). Peneliti melakukan wawancara dengan beliau pada hari Minggu pada tanggal 5 dan 21 Juni 2011 di rumah beliau yaitu di kelurahan Winduhaji Kabupaten Kunigan. Beliau aktif di FKPP Kabupaten Kuningan mulai dari awal berdirinya sampai sekarang. Cukup lama beliau bergerak di

Organisasi FKPP Kabupaten Kuningan. Sambutan hangat dari beliau membuat peneliti tidak sungkan dalam mempertanyakan berbagai hal mengenai penelitian Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan.

4.1.2. KH. Drs. N. Abdullah Dunun



(Sumber : Dokumentasi FKPP)

Bapak KH. Drs. N. Abdullah Dunun adalah ketua Tim Khusu Ulama (TKU) yang merupakan tim yang memenangkan calon bupati Kabupaten Kunigan pada tahun 2009 dan juga merupakan dewan pembina FKPP. Peneliti melakukan wawancara dengan beliau pada hari Selasa pada tanggal 21 Juni 2011 di rumah beliau. Beliau aktif di FKPP Kabupaten Kuningan mulai dari awal berdirinya sampai sekarang. Cukup lama beliau bergerak di Organisasi FKPP Kabupaten Kuningan. Sambutan hangat dari beliau membuat peneliti tidak sungkan dalam mempertanyakan berbagai hal mengenai keterlibatan ulama dalam dunia politik meskipun beliau menolak adanya keterlibatan FKPP dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuningan.

4.1.3. KH. Abdul Aziz A.N



(Sumber : Dokumentasi FKPP)

Bapak KH. Abdul Aziz A.N lahir di Ciamis pada 19 Mei 1957 yang merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda dan juga ketua FKPP dari tahun 2009 - 2014. Selain menjabat sebagai ketua FKPP Kabupaten Kuningan, beliau juga menjabat sebagai Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Peneliti melakukan wawancara dengan beliau pada hari Sabtu pada tanggal 25 Juni 2011 di rumah beliau. Beliau aktif di FKPP Kabupaten Kuningan mulai dari awal berdirinya sampai sekarang. Cukup lama beliau bergerak di Organisasi FKPP Kabupaten Kuningan. Sambutan hangat dari beliau membuat peneliti tidak sungkan dalam mempertanyakan berbagai hal mengenai penelitian Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan.

4.1.4. KH. Aman Syamsul Falah



(Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2011)

Bapak KH. Aman Syamsul Falah merupakan Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda dan juga ketua III FKPP dari tahun 2009 - 2014. Selain menjabat sebagai ketua III FKPP Kabupaten Kuningan, beliau juga merupakan anggota dari Tim Khusus Ulama (TKU) dan juga menjadi Tim Sukses dari Bupati Kabupaten Kuningan H. Aang Hamid Suganda. Peneliti melakukan wawancara dengan beliau pada hari Jumat pada tanggal 24 Juni 2011 di rumah beliau. Beliau aktif di FKPP Kabupaten Kuningan mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Sambutan hangat dari beliau membuat peneliti tidak sungkan dalam mempertanyakan berbagai hal mengenai penelitian Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan.

a. Dadan Wildan, M.Pd

Bapak Dadan adalah dosen di Universitas Kuningan (UNIKU) yang merupakan Tim Sukses dari Bupati H. Aang Hamid Suganda yang melakukan pendekatan-pendekatan terhadap para ulama di Kabupaten

Kuningan. Peneliti melakukan wawancara dengan beliau pada hari Sabtu pada tanggal 25 Juni 2011 di rumah beliau. Sambutan hangat dari beliau membuat peneliti tidak sungkan dalam mempertanyakan berbagai hal mengenai penelitian Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuningan.

4.2. Hasil Penelitian

Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan merupakan wadah komunikasi seluruh pondok pesantren di Kabupaten Kuningan yang memiliki posisi sekaligus peran yang sangat strategis dalam upaya membina dan membangun masyarakat Kuningan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kuningan untuk menjadikan "Kuningan lebih sejahtera berbasis pertanian dan periwisata yang maju dalam lingkungan lestari dan agamis tahun 2013".

Sehingga dalam melaksanakan visi dan misi FKPP dan juga meningkatkan peran FKPP itu, para ulama di Kabupaten Kuningan diharapkan bisa dekat dengan pemerintah atau ulama itu menjadi pejabat pemerintah bila dirasa perlu. Karena seperti pengertiannya ulama yaitu orang yang tahu atau memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Kata ulama merupakan bentuk jamak dari 'alim yang keduanya berarti "yang tahu" atau "yang memiliki pengetahuan".

Untuk mendapatkan hasil penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan sebagai narasumber, yaitu KH. Aman Syamsyul Falah, selain itu juga peneliti melakukan observasi terhadap bahasan penelitian ini.

Peneliti tidak pernah menilai benar atau salah jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Peneliti memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan pemahamannya atas pertanyaan peneliti. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berdasarkan isi pembicaraan inilah akan dapat ditangkap makna yang difahami oleh para informan. Asumsi ini didasari pemikiran bahwa makna yang diberikan seorang individu atas suatu realitas, termasuk satu konsep atau kata, akan tergambarkan dari bagaimana mereka mengapresiasikan makna tersebut dalam hidup sehari-hari.

Saat melakukan wawancara dengan informan, peneliti mendatangi rumah para informan disebabkan kesibukan-kesibukan para informan yang peneliti maklumi karena mereka sebagai ulama pengasuh pondok pesantren dan juga merupakan pengurus organisasi-oraganisasi islam lainnya.

Langkah pertama yang peneliti lakukan sebelum mewawancarai para informan adalah meminta informasi/identitas diri. Dalam hal ini peneliti mentapkan jumlah yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, yang terdiri dari 1 informan kunci, dan 5 sebagai informan sebagai pendukung ataupun pembanding dari pendapat-pendapat informan kunci.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada informan, peneliti mendapatkan hasil penelitian bahwa adanya perbedaan pendapat antara para

ulama mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuningan, namun para ulama sepakat bahwa ulama dan pemerintah harus mempunyai kedekatan.

Untuk mengetahui Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2009 dapat dilihat pada hasil penelitian dibawah ini :

1. Proses Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2009

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, hasilnya bahwa proses komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuningan tahun 2009, memberikan hasil bahwa Pengurus besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) tidak mengalami kesulitan dalam menentukan figure calon Bupati Kuningan, karena sebelumnya sudah terbentuk kedekatan-kedekatan antara Bupati Kuningan dengan para ulama di Kabupaten Kuningan. Kedekatan ulama dan Bupati Kuningan berawal dari pengajian dwiwulan atau pengajian rutin dua bulan sekali yang diadakan oleh bupati Kuningan untuk bersilaturahmi dengan para ulama di Kabupaten Kuningan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh KH. Aman Syamsul Falah, Ketua III FKPP, yang memberikan informasi pada peneliti, dan proses dialog dilakukan di rumah beliau,

> "Prosesnya itu adalah, awalnya itu adanya pengajian rutin dwi wulan, pengajian rutin 2 bulan sekali yang temanya silaturahmi ulama dengan bupati, isinya itu dialog interaktif antara ulama dan bupati. awal awalnya hanya pengajian biasa tapi kemudian menjadi satu kaukus komitmen bersama di intern para kiai dan para ulama pesantren untuk mengusung inkomben. Karena memang dirasa, dinilai oleh para kiai bahwa beliau itu dekat dengan ulama. kami berusaha membangun komunikasi di tinggkat elit kiai yang disebut dengan ting teng, itu terdiri dari KH. Abudllah Dunun pimpinan pesantren almutawali, KH.Dodo Murtadlo,Lc. Pimpinan pesantren Riyadhul Huda, kemudian saya sendiri, ditambah ada Ust. Ackhidin Noer dan disana juga hadir Drs.KH. Hafidin Ahmad yang sekarang menjabat ketua MUI. Itu dibangun komunikasi secara intens di tingkat elit kiai".[1]

Kemudian peneliti melayangkan pertanyaan selanjutnya, "dalam mensosialisasikan keputusan politiknya seperti apa pak ?", beliau menjawab,

> "Jadi hasil daripada kesepakatan itu untuk mendukung inkomben kami komunikasikan dengan adanya pertama itu silaturahmi buka bersama. Hehe..heheh…yaitu buka bersama. Itu kalo tidak salah buka bersama itu hanya 1 kali H min apa ya, kurang lebih H min 15 harian. Jd setelah terwujud visi dan misinya, dan sudah terbentuk TKU dari mulai tingkat kabupaten dan kecamatan sampai kedesa mengadakan buka bersama. Karena memang itu yang paling efektif. Dan ada bagian humas, kiai bagian humas di TKU yang memang bukan hanya menunggu bola tapi jemput bola ke desa desa dimana diadakannya pengajian rutin. Pengajian rutin mingguan, bulanan. Itu diantara cara menyampaikan pesan politik pada konstituen".[2]

[1] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011
[2] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan berikutnya. "konsolidasinya seperti apa pak ?", beliau menjawab.

> "Kita menciptakan konsolidasi yang praktislah. Praktis itu menggunakan komunikasi teknologi modernlah, menggunakan sms dengan jargon-jargon politik. Tidak banyak menguras tenaga. Mengerahkan masa. jadi sederhana aja melalui sms aja. Jadi tidak ada istilah pengerahan masa besar-besaran. Jadi menggunakan komunikasi praktis dan ekonomis sms yang isinya itu jargon-jargon politik atau maneuver-manuver politik".[3]

Selanjutnya wawancara dilanjutkan tentang proses komunikasi politik FKPP dalam pemilukada di Kabupaten Kuningan tahun 2009 dengan narasumber berikutnya KH. Dodo Murtadlo, Lc, mantan ketua FKPP periode sebelumnya dan sekarang menjadi Dewan Pembina FKPP :

> "harus jadi catatan bahwa FKPP tidak bisa dikaitkan dengan politik, ada juga Tim Khusus Ulama (TKU) yang memang isinya adalah pengurus FKPP, alasan berpihak pada pak aang adalah salah satu kelebihan pak Aang adalah beliau sangat dekat dengan para ulama, bisa dilihat dari seringnya beliau mengadakan pengajian rutin dwi wulan untuk bersilaturahmi dengan ulama di Kuningan, sehingga kita tidak sulit dalam menentukan". [4]

Informan lainnya yaitu, KH. Abdul Aziz AN, selaku ketua FKPP, mengatakan bahwa :

> "komunikasi politik FKPP dibangun dengan dasar untuk kemaslahatan umat, dalam prakteknya FKPP bermain dengan santun, sosialisasi dan konsolidasinya pun memanfaatkan setiap ada pertemuan para kiai, tidak secara khusus mengadakan sosialisasi dan konsolidasi".[5]

---

[3] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011
[4] wawancara pada Selasa, 21 Juni 2011
[5] wawancara pada Kamis. 23 Juni 2011

Peneliti melanjutkan pertanyaan lainnya pada informan penelitian "maksud dari bermain santun ini seperti apa pak ?". selanjutnya informan menjawab "maksudnya tidak seperti partai politik, yang segala sikapnya terbuka dan konprontasi".

Informan lainnya, bapak Dadan selaku tim sukses Bupati Kuningan mengatakan bahwa "pak bupati memang melakukan pendekatan-pendekatan terhadap para ulama lewat pengajian rutinnya, ini dilakukan agar pemerintah bisa dekat dengan para ulama di Kuningan".[6]

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan lainnya, KH. Drs. N. Abdullah Dunun, sebagai ketua Tim Khusus Ulama dan juga Dewan Pembina FKPP menyatakan bahwa :

> "FKPP tidak dalam konteks politik, karena FKPP bersifat indipenden, yang ada adalah TKU, saya ketuanya, K.Aman sekretaris, dan beberapa kiai lainnya, meskipun orangnya masih itu-itu juga. Kalaupun ulama harus berpolitik itu karena ulama itu harus dekat dengan pemerintah, karena ulama merupakan pengontrol masyarakat dan pemerintah, untungnya bupati sekarang bisa dekat dan selalu mendengar apa kara para ulama, oleh sebab itu kita para ulama merasa perlu untuk mendukung kembali pak Aang untuk menjadi bupati".[7]

Informan ini menyatakan dengan tegas bahwa FKPP bukan untuk berpolitik, namun diakui oleh beliau bahwa beberapa ulama yang termasuk pengurus FKPP memang berpolitik, namun itu juga dalam konteks individu bukan organisasi.

[6] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011
[7] wawancara pada Selasa, 21 Juni 2011

2. Budaya Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2009

Budaya dan komunikasi seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan dan komunikasi politik salah satunya dipengaruhi oleh factor budaya yang dianut serta proses komunikasi politik yang pernah dilaluinya, artinya bahwa dengan menggunakan konsep komunikasi dan kebudayaan bahwa komunikasi politik juga pada dasarnya merupakan bagian dari, dan dipengaruhi oleh budaya politik suatu masyarakat (Muhtadi, 2008:27). Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan hasil observasi dalam penelitian ini dapat mengungkap bahwa budaya komunikasi politik pengurus besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati Kuningan tahun 2009.

Hasil dari wawancara mendalam dan dialog yang dilakuan peneliti, seperti dengan informan KH. Aman Syamsul Falah, Ketua III FKPP, menyatakan bahwa :

> "Kalau yang namanya kiai dan ulama itu kan sudah dianggapnya tokoh yah figure, jadi figure di masyarakat yang memang mengakar, itu diakui oleh siapapun bahwa dengan adanya potensi itu dimana seorang kiai adalah merupakan figure dan panutan masyarakat panutan umat maka ada daya magnet tersendiri. Kita menggunakannya itu ajah jadi kefiguran atau ketokohan. Komunikasi seorang tokoh mengajak konstituen, mengajak umat, mengajak masyarakat, mengajak pemilih untuk mendukung sekaligus memilih inkomben".[8]

[8] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011

Sedangkan menurut informan lainnya, KH. Abdul Aziz AN, Ketua Umum Dewan Pengurus harian FKPP, menyatakan bahwa "budaya komunikasi politiknya ya budaya kiai aja, ada yang apriori, ada yang kumaha diaturna bae dan macem-macem lah".[9]

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan lainnya, KH.Dodo Murtadlo, Lc, yang menyatakan bahwa : "komunikasi politik di dunia pesantren ada istilah *kumaha ceuk kiai*, jadi dalam hal ini seorang kiai atau ulama merupakan orang yang berilmu dan dipercaya, jadi para santri cenderung mengikuti apa kehendak kiainya".[10]

Informan lainnya, KH. Drs. N. Abdullah Dunun, yang merupakan Dewan Pembina FKPP, menyatakan bahwa :

> "budaya komunikasi politik para ulama di kuningan ya menggunakan budaya cultural, yaitu bahwa dimana masyarakat menganggap kiai atau ulama itu adalah orang yang berilmu dan mengerti, sehingga ada kecenderungan masyarakat mengikuti apa pilihan kiai".[11]

Informan lainnya, bapak dadan selaku tim sukses cabub mengatakan bahwa,

> "pendekatan-pendekatan terhadap para ulama dan pesantren adalah bagian penting untuk mendapatkan masa, karena apabila ulama atau kiai nya sudah mendukung kita, otomatis santri, ibu-ibu pengajian juga akan mengikutinya".[12]

[9] wawancara pada Kamis. 23 Juni 2011
[10] wawancara pada Selasa, 21 Juni 2011
[11] wawancara pada Selasa, 21 Juni 2011
[12] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011

3. Faktor-Faktor yang Mendasari Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2009

Hasil dari wawancara mendalam dan dialog yang dilakukan peneliti, seperti ilustrasi wawancara dengan informan KH. Aman Syamsul Falah selaku ketua III Dewan Pengurus Harian Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, menyatakan bahwa :

> "Tadi ada sebagian alasan yang disebut, alasannya adalah secara kepribadian orangnnya low profile ya, jadi orangnya dekat dengan ulama, kemudian punya komitmen untuk memajukan agama, dan mengadakan perubahan-perubahan yang akseleratif dalam bidang pembangunan di kuningan, juga yang terpenting yang paling mendasari kenapa kami memilih beliau, beliau punya komitmen untuk membangun sarana pemersatu umat yang disebut dengan KIC. Dan memang itu merupakan mou tidak tertulis, mou secara lisan, kontrak politik secara lisan yang memang kami pinta kepada beliau, ternyata beliau itu sangat respek dan sangat respon terhadap keingin para ulama dan para kiai, karena memang di kuningan itu maysarakat kuningan kan heterogen ya..plural ya..perlu adanya satu sarana pemersatu umut yang tadi disebut KIC itu, dan itu cita-cita para ulama,ternyata sekarang alhamdulilah sudah mesjidnya sudah 90% bersih, seluas 1 hektar mesjid, semuanya 7 hektar luas KIC nya".[13]

Kemudian peneliti melayangkan pertanyaan berikutnya, "lalu mengapa FKPP merasa perlu melakukan komunikasi politik dalam pemilukada 2009 ?". beliau menjawab :

> "Karena memang masih ada kesan adanya friksi, ada friksi diantara organisasi keagamaan yang besar seperti NU dan Muhammadiah, dengan adanya sarana pemersatu itu diharap friksi itu bisa diminimalisir. Karena memang kadang-kadang ada stitmen-stitmen

[13] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011

> dari organisasi tertentu yang memang menyinggung, menyinggung perasaan organisasi lain".[14]

Kemudian peneliti juga melayangkan pertanyaan, "maksud dari friksinya seperti apa pak ?". kemudian beliau menjawab :

> "tentang kunut nyeleneh…tentang tahlil nyeleneh…tentang tawasul nyeleneh kan gitu, itu kan takut nanti terjadi konflik horizontal, kitu, jadi di antisipasi dengan adanya sarana pemersatu dengan duduk bersama, paling tidak bukan untuk menciptakan kita itu satu pemahaman yang sama, tapi kita harus menciptakan 1 kebersamaan dalam perbedaan sesuai dengan keyakinan faham keagamaan masing-masing, karena pemahaman tidak bisa dipaksakan, tanpa menyinggung secara terang-terangan, ok secara amaliyah silahkan, tapi stitmen-stitmen dipermukaan jangan dimunculkan, tujuannya supaya kondusif, karena kalo menyangkut agama itu sangat sensitive, itu yang menjadi benak para ulama supaya adanya kuningan Islamic center itu seperti itu".[15]

Selanjutnya wawancara mendalam dilakukan pada informan lainnya, KH. Dodo Murtadlo, Lc. Sebagai Dewan Pembina Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, mengatakan bahwa :

> "factor yang mendasari komunikasi politiknya adalah karena kami ingin merealisasikan kuningan Islamic center, itu juga kan demi masyarakat umumnya dan demi dunia pesantren khususnya. Selain itu juga ingin dibentuknya mahad ali' yaitu kalau di pendidikan formal bisa dikatakan tingkatan universitas, tapi ini untuk para santri, yang mengajarnya nanti kiai-kiai atau profesionalis bidang tertentu".[16]

Kemudian peneliti melayangkan pertanyaan berikutnya, "mengapa FKPP merasa perlu melakukan komunikasi politik pada pemilukada 2009?". Beliau menjawab :

> "dalam AD/ART kan ada visi dan misi, program kerja, yang kesemuanya membutuhkan dukungan pemerintah, sehingga apabila

[14] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011
[15] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011
[16] wawancara pada Selasa, 21 Juni 2011

> kita tidak ada kemitraan dengan pemerintah, akan sangat sulit untuk melaksanakan itu semua".[17]

Lain halnya dengan informan berikutnya, KH. Abdul Aziz AN, selaku ketua umum Dewan Pengurus Harian Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, yang mengatakan :

> "factor-faktor nu mendasari FKPP melakukan komunikasi politik karena kita ingin : 1) para kiai setelah pemilihan bupati jadi ada kerjasama yang baik, 2) aspirasi para kiai direspon, 3) tidak terkena fitnah, dan lain sebagainya".[18]

Informan lainnya, KH. Drs. N. Abdullah Dunun, selaku Dewan Pembina Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten yang juga merupakan ketua Tim Khusus Ulama, mengatakan bahwa :

> "factor-faktor nu mendasari ulama di kuningan melakukan komunikasi politik ialah ingin merealisasikan kuningan Islamic center, selain itu juga kita ingin membantah mitos di kuningan, di kuningan the jang ada mitos bahwa tidak ada bupati yang jadi dua kali, menjabat dua kali, jadi kita selaku ulama di kuningan punya kewajiban untuk membantah mitos itu".[19]

4. Konstruksi Realitas Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2009

Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dalam penelitian ini, dapat mengungkap realitas politik Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati

[17] wawancara pada Selasa, 21 Juni 2011
[18] wawancara pada Kamis. 23 Juni 2011
[19] wawancara pada Selasa, 21 Juni 2011

Kabupaten Kuningan tahun 2009, Nampak jelas bahwa komunikasi politik yang dilakukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati Kuningan tahun 2009 dalam menghubungkan pikiran-pikiran politik yang terjadi didalam tubuh FKPP itu sendiri tidak ada persamaan makna, maka yang terjadi terkesan adanya konflik atau friksi, hasil observasi langsung bahwa itu terlihat ada dua kubu pengurus FKPP yang masing-masing mempuyai sikap politik yang berbeda.

Hasil dari wawancara mendalam dan dialog yang dilakukan peneliti, seperti dengan informan KH. Drs. N. Abdullah Dunun selaku ketua Tim Khusus Ulama dan juga Dewan Pembina Forum Komuniakasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, menyatakan bahwa : "realitas yang terjadi adalah bahwa dalam realitasnya terjadi dua kubu, saya kan di TKU mendukung pak Aang, sedangkan kubu satu lagi adalah KH. Abdul Aziz yang mendung pak Aan Suharso".[20] Kemudian peneliti melayangkan pertanyaan berikutnya, "kenapa bisa menjadi dua kubu seperti itu pak ?". beliau menjawab, "waktu itu KH. Abdul Aziz memang sedang ada konflik dengan pak bupati sehingga pro pak Aan bersama pengurus NU lainnya".[21]

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada informan berikutnya, KH. Dodo Murtadlo, Lc, yang merupakan Dewan Pembina Forum Komunikasi Politik (FKPP) Kabupaten Kuningan, meyatakan bahwa :

> "realitasnya waktu itu kita memang ada perbedaan dengan ua Aziz, ua Aziz mah memilih pak Aan Suharso, sedangkan kita memilih pak Aang, itu terjadi kan bukan karena kita ada konflik atau apa, tapi

[20] wawancara pada Selasa, 21 Juni 2011
[21] wawancara pada Selasa, 21 Juni 2011

> karena ua Aziz merupakan ketua Dewan Syuro PKB yang memang waktu itu PKB mengusung pak Aan Suharso".[22]

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada informan berkutnya. KH. Abdul Aziz AN, selaku ketua umum Dewan Pengurus Harian Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, menyatakan bahwa :

> "realitasnya yang terjadi adalah di FKPP ada yang memilih ada yang tidak, ada yang hanya cari duit saja, ada yang golput juga karena memepertahankan kiai tidak terlibat politik, dan lain-lain, seperti masyarakat umumnya lah".[23]

Kemudian peneliti melayangkan pertanyaan berkutnya, "terkait adanya perbedaan kubu di tubuh FKPP itu seperti apa?". Beliau menjawab, "perbedaan kubu secara terbuka sebenarnya tidak ada".[24]

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci, KH. Aman Syamsul Falah, selaku ketua III dewan pengurus harian Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, menyatakan bahwa :

> "mayoritas ulama itu waktu itu memilih, realitas kan? Waktu itu ulama itu mayoritas memilih beliau, memilih Aang Hamid Suganda lah waktu itu. Karena memang kita dari awal komitmen bahwa kita tidak akan terjebak pada istilah harapan baru, karena kalo harapan baru bisa diklik balik menjadi baru harapan kan gitu..tapi kalo yang namanya Aang dengan kinerjanya selama 5 tahun itu sudah nyata tur karasa, maka yang namanya slogan nyata tur karasa itu memang dari mulai subang sampai ciroke itu. Nyata tur karasa itu slogan-slogan yang memang realitasnya begitu, sehingga ulama juga tidak bisa mengelak".[25]

---

[22] wawancara pada Selasa, 21 Juni 2011
[23] wawancara pada Kamis. 23 Juni 2011
[24] wawancara pada Kamis. 23 Juni 2011
[25] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan berikutnya, “ada kubu FKPP yang menyatakan bahwa ulama tidak boleh berpolitik, itu bisa diceritakan seperti apa?”. Beliau menjawab :

> “memang yang namanya agamis masuk pada lingkaran politik praktes memang dilemma, karena yang namanya nilai moral itu, kan agama itu nilai moral, kadang-kadang kalo umpamanya dengan budaya politik di kita itu kadang-kadang terkontaminasi dengan realitas budaya politik, tapi karena ulama disini bukan terjun di dunia partai yang mengusung ini masih bisa relative bersih, karena memang ulama-ulama ini tidak terjun langsung di politik praktis pengusung, karena hanya pendukung dan pemilih”.[26]

Kemudian peneliti juga menanyakan tentang adanya kubu lain, “tanggapannya tentang realitas adanya kubu KH. Abdul Aziz seperti apa?”. Beliau menjawab, “ketika ua ke Asri, ini kan politik kiai, ketika ua ke Asri kita ke Arohman, sekarng ua dengan bupati kan bagus komunikasinya dengan kendaraan FKPP nya”.[27]

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian di atas, merupakan proses penelitian yang dilakukan peneliti dalam kurun waktu februari 2011 dengan melakukan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat ijin penelitian mulai pada secretariat jurusan Ilmu Komunikasi dan Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan. Telah dibahas dalam metodologi penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus komunikasi politik Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok

[26] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011
[27] wawancara pada Kamis. 23 Juni 2011

Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati secara Langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009.

4.2.1. Proses Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2009

Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:790). Dalam konteks ini proses komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009 adalah rangkaian kegiatan yang ditempuh oleh pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam melakukan komunikasi politik dalam pemilihan Bupati langsung Kabupaten Kuningan tahun 2009. Dalam pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan, pengurus besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) sadar atau tidak disadari bahwa, pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) terlibat dalam proses pemilihan Bupati tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, karena menurut informan penelitian KH. Aman Syamsul Falah, Ketua III Dewan Pengurus Harian Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa :

> "Prosesnya itu adalah, awalnya itu adanya pengajian rutin dwi wulan, pengajian rutin 2 bulan sekali yang temanya silaturahmi ulama dengan bupati, isinya itu dialog interaktif antara ulama dan bupati. awal awalnya hanya pengajian biasa tapi kemudian menjadi satu kaukus komitmen bersama di intern para kiai dan para ulama pesantren untuk mengusung inkomben. Karena memang dirasa, dinilai oleh para kiai

> bahwa beliau itu dekat dengan ulama. kami berusaha membangun komunikasi di tinggkat elit kiai yang disebut dengan ting teng, itu terdiri dari KH. Abudllah Dunun pimpinan pesantren almutawali, KH.Dodo Murtadlo,Lc. Pimpinan pesantren Riyadhul Huda, kemudian saya sendiri, ditambah ada Ust. Ackhidin Noer dan disana juga hadir Drs.KH. Hafidin Ahmad yang sekarang menjabat ketua MUI. Itu dibangun komunikasi secara intens di tingkat elit kiai".[28]

Dalam melakukan proses komunikasi politik tersebut didalam pengurus besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) terjadi interaksi dan komunikasi diantara pengurus FKPP dalam hal ini adalah para ulama dan calon bupati, seperti dikatakan informan penelitian bapak Dadan anggota tim sukses calon Bupati Aang Hamid Suganda, mengatakan bahwa : "pak bupati memang melakukan pendekatan-pendekatan terhadap para ulama lewat pengajian rutinnya, ini dilakukan agar pemerintah bisa dekat dengan para ulama di Kuningan".

Dalam hal ini komunikasi politik memainkan peranan yang amat penting dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sikap politik pengurus besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan. Pengurus besar FKPP dituntun untuk menjalin kerjasama, hubungan, dan komunikasi yang baik. Dalam konteks ini komunikasi politik diartikan sebagai hubungan, dialog, pertukaran pikiran atau pendapat, debat, pertemuan, serta segala macam "transfer lambang".

Adapun proses komunikasi politik yang dilakukan Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009

[28] wawancara pada Jum'at, 24 Juni 2011

melalui proses, yang pertama, pengurus inti Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan melontarkan atau mengekspos calon Bupati, kedua membentuk tim “Ting Teng” untuk merumuskan sikap politik, ketiga dari tim “Ting Teng” itu kemudian membentuk Tim Khusus Ulama (TKU), keempat sosialisasi ke kiai-kiai di tingkat Kabupaten sampai ke kiai-kiai di tingkat Kecamatan. Maka dapat dibuat model proses Komunikasi Politik Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009, sebagai berikut :

Gambar 4.1
Model Proses Komunikasi Politik Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kuningan tahun 2009



Sumber : Peneliti, 2011

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa pengurus FKPP bertemu dengan Cabub pada pengajian rutin dwiwulan yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali di rumah Cabub H. Aang Hamid Suganda yang pada waktu itu menjabat sebagai bupati Kuningan. Dari pengajian itu muncul komitmen dari beberapa pengurus FKPP untuk mengusung kembali H. Aang HS sehingga membentuk tim yang disebut “Ting Teng” yang bertugas untuk melobi pengurus FKPP lainnya agar mengusung incumbent. Dalam melakukan tugasnya tim “ting teng” membentuk tim yang disebut “tim

khusus ulama" atau disingkat TKU yang bertugas untuk melakukan sosialisasi langsung terhadap pengurus-pengurus di daerah dengan menggunakan media pertemuan buka bersama. Dari hasil keputusan politik yang dirumuskan pada saat buka bersama kemudian disosialisasikan oleh pengurus di tingkat kabupaten ke pengurus di tingkat kecamatan yang kemudian ke daerah-daerah.

Dari gambar diatas, FKPP melakukan perannya sebagai komunikator politik dalam proses komunikasi politik FKPP dalam pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009. Adapun pesan yang disampaikan oleh FKPP selaku komunikator adalah keputusan politik untuk mengusung kembali incumbent, sedangkan untuk media peneliti menganalisis ada dua media, yaitu tim "ting teng" sebagai media primer atau media tahap satu dan "tim khusus ulama" (TKU) sebagai media sekunder atau media tahap dua yang mensosialisasikan keputusan politiknya kepada pengurus FKPP di kabupaten dan di kecamatan sebagai khalayak atau target politik dari proses komunikasi politik FKPP dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009 dengan harapan terbentuknya dukungan terhadap incumbent dari FKPP.

4.2.2. Budaya Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2009

Budaya komunikasi politik Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009, yang terbangun adalah budaya komunikasi politik yang tertutup, maksud tertutup disini adalah FKPP tidak secara terang-terangan dalam mengusung incumbent. Hal ini seperti hasil dari wawancara peneliti terhadap informan yang mayoritas menolak menghubungkan FKPP dengan dukungan para ulama di Kabupaten Kuningan untuk mengusung incumbent, bahkan sebagian informan mengatakan bahwa dalam konteks politik FKPP tidak melakukan peran infrastrukturnya sebagai lembaga atau organisasi yang terlibat dalam percaturan politik di Kabupaten Kuningan khususnya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dari FKPP itu sendiri. Sehingga yang melakukan komunikasi politik pada pemilihan Bupati tahun 2009 di Kabupaten Kuningan adalah para ulama secara individu atau pribadi diluar konteks FKPP.

Selain budaya komunikasi politik yang tertutup, peneliti juga menemukan masih kentalnya budaya pesantren dalam konteks guru atau kiai terhadap murid atau santrinya, yaitu budaya kefiguran atau ketokohan, karena dalam dunia Pesantren ada istilah budaya "*kumaha ceuk kiai*" (Apa kata kiai), dalam artian setiap keputusan-keputusan yang berkaitan amaliyah

ataupun tentang hukum para santri atau murid mengikuti apa saran dari kiai. Dan inilah kekhasan pesantren dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain, sehingga dalam momen politik seperti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuningan tahun 2009 pun budaya seperti ini tetap terbawa keranah politik, sehingga keputusan politik tergantung pada kiai-kiai tertentu yang di anggap dituakan di Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, sehingga terkesan tidak terbentuknya demokrasi di Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, terutama di tingkatan anggota.

Hal ini menjadikan pesantren terkesan "murah". Maksudnya adalah dalam mencari dukungan politik hanya perlu mendapatkan dukungan dari kiai-kiai yang dituakan, apabila kiai-kiai yang dituakan sudah menyatakan dukungannya, maka secara otomatis sudah dapat dibaca arah dari dukungan tersebut. Begitu pula dengan FKPP, peneliti menemukan kesan bahwa masih adanya pengurus FKPP yang *kumaha diaturna*. Maksudnya adalah bagaimana diaturnya oleh beberapa kiai dan apapun keputusan politik tersebut menjadi keputusan bersama.

4.2.3. Faktor-faktor yang Mendasari Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2009

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara secara mendalam dan observasi terhadap Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati secara langsung di

Kabupaten Kuningan tahun 2009, hasilnya bahwa didapatkan factor yang mendasari komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren dalam Pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009, sebagai berikut :

1. Kedekatan pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dengan pemerintah dalam hal ini adalah bupati.

   Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa salah factor yang dominan yang dimiliki Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan adalah adanya kedekatan para kiai yang merupakan anggota FKPP kepada pemerintah, sehingga untuk merealisasikan program-program kerja FKPP bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah.

2. Komitmen pemerintah untuk memajukan agama

   Factor lain yang cukup dominan adalah bahwa Bupati Aang Hamid Suganda punya komitmen untuk memajukan agama, sesuai misi kuningan yang ingin menjadi Kabupaten yang agamis, factor yang paling dominan adalah Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan ingin merealisasikan Kuningan Islamic Center (KIC).

3. Adanya friksi-friksi tentang amaliyah pada organisasi-oraganisasi besar islam

   Factor lain yang mendasari komunikasi politik pengurus besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan adalah

adanya friksi-friksi atau perbedaan-perbedaan soal aliran, amaliyah dan keyakinan. Sehingga FKPP ingin menyatukan friksi-friksi tersebut dalam hal tidak saling memojokan satu sama lain.

4. Membantah mitos, bahwa di Kabupaten Kuningan tidak ada Bupati yang jadi selama dua periode

   Setelah peneliti melakukan penelitian ini, ternyata muncul factor Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan melakukan komunikasi politik dalam pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009 adalah mitos bahwa tidak ada Bupati Kuningan yang menjabat selama dua periode, sehingga hal ini menuntun FKPP selaku ulama-ulama di Kabupaten Kuningan untuk membantah mitos ini.

4.2.4. Realitas Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2009

Dalam realitasnya peneliti menemukan perbedaan yang berakibat terbentuknya dua kubu di Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009, ini bisa dilihat dari terpecahnya pengurus FKPP baik di tingkat Kabupaten ataupun di tingkat Kecamatan, namun hal ini merupakan strategi politik yang digunakan FKPP dalam menyikapi pemilihan Bupati, artinya sikap politik FKPP bersifat “setengah muka” yaitu muncul kesan bahwa FKPP membagi dalam dua kubu guna mengantisipasi

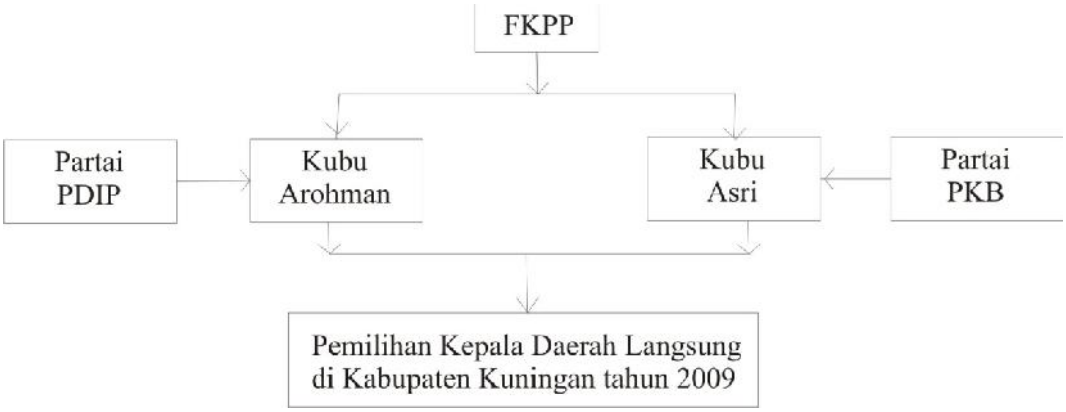
apabila salah satu dukungannya tidak menang dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Kuningan. Dua kubu itu adalah :

1. Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan yang mendukung H. Aang Hamid Suganda. Kelompok ini berpandangan bahwa mereka lebih memilih yang pasti.
2. Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan yang mendukung Aan Suharso. Kelompok ini berpandangan bahwa mereka ingin harapan baru bagi masyarakat Kunigan.

Adapun kategori kelompok Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009, maka dibuat bisa dibuat bagan sebagai berikut :

Gambar 4.2

Bagan Kategori Kubu Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009



Sumber : Peneliti, 2011

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa pengurus FKPP pada pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009 dalam realitasnya terbagi pada dua kubu, yaitu kubu Arohman dengan cabub H. Aang Hamid Suganda dengan didukung oleh partai PDIP, sedangkan kubu Asri adalah kubu yang mendukung Aan Suharso yang didukung oleh partai PKB.